

NASKAH PROKLAMASI & PIAGAM PERJUANGAN SEMESTA - PERMESTA

=====

P R O K L A M A S I

Demi keutuhan Republik Indonesia, serta demi keselamatan dan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnya, dan Rakjat Daerah di Indonesia Bahagian Timur pada khususnya, maka dengan ini kami njatakan seluruh wilayah Territorium VII dalam keadaan darurat perang serta berlakunja pemerintahan militer sesuai dengan pasal 129 Undang - Undang Dasar Sementara , dan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1948 dari Republik Indonesia.

Segala peralihan dan penjesuaiannja dilakuk-kan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dalam arti tidak ulangi tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa beserta kita dan menurunkan berkat dan hidajatNja atas umatNja,-

Makassar , 2 M a r e t 1957.-
Panglima Tentara & Territorium VII

ttd.

Letk : H.N.V. Sumual

Nrp : 15958

P I A G A M
P E R D J O A N G A N S E M E S T A
DALAM WILAJAH TT-VII WIRABUANA

I. MUKADIMAH

-
1. Kita sebagai Patriot Indonesia menjadari sedalam-dalamnja, bahwa keadaan Tanah Air Indonesia, setelah melalui masa perdjoangan/revolusi selama kurang lebih 12 tahun, pada dewasa ini sangat kritik dan mengchawatirkan.
 2. Untuk mentjegah keruntuhan dan kehantjuran, disebabkan pertentangan dan perpetjahan antara kita dengan kita, maka dipandang mutlak untuk segera mengambil tindakan tjepat dan djitu dengan penuh tanggung djawab sebagai abdi Nusa dan Bangsa Indonesia.
 3. Dalam hal tersebut di atas, maka perlulah diambil kebidjak-sanaan untuk menerima segala bengkalai revolusi Nasional Indonesia jang ternjata masih penuh dalam segala lapangan dan tingkatan, serta mempergunakan tenaga-tenaga revolusioner sebagai modal untuk penjelesaiannja.
 4. Demi kesedjahteraan dan keselamatan Rakjat Indonesia pada umumnja dan Rakjat Daerah pada chususnja, demi tudjuan proklamasi 17 Agustus 1945, serta petundjuk Tuhan jang Maha Esa, maka kami jang berkumpul pada tanggal 2 Maret 1957 dari djam 03.00 sampai djam 06.00 bertempat di Gubernuran Makassar, setelah menimbang dan membahas segala sesuatu sedalam-dalamnja seia-sekata jang diiringi oleh sumpah dan djandji bathin jang murni, untuk mengambil langkah-langkah jang tegas, guna melaksanakan rentjana perdjoangan jang tersusun rapih, agar diatasilah kesulitan dan keruwetan jang menimpa bumi tumpah darah Indonesia pada dewasa ini.

II TUDJUAN PERDJOANGAN

A. Tingkat Daerah

1. Bidang Pertahanan

- 1.1. Wilayah Indonesia Bagian Timur sebagai lingkungan pertahanan wilayah Militer tidak dipisahkan dan memerlukan rentjana djangka pendek dan pandjang jang serius [vide Terr. VII].
- 1.2. Dalam perdjoangan membebaskan Irian Barat, Wilayah Indonesia Timur mutlak merupakan basis Militer dan politikologis.

2. Bidang Pemerintahan

- 2.1. Untuk kepentingan pembelaan dan praktisnja pembangunan, maka kepada 4 propinsi jang ada dalam wilayah Indonesia Bagian Timur harus segera diberikan otonomi jang seluas-luasnja.
- 2.2. Otonomi luas, berarti buat :
 - = daerah surplus : 70% dari pendapatan Daerah untuk daerah dan 30% untuk Pemerintahan Pusat.
 - = daerah minus : 100% pendapatan daerah untuk daerah dan ditambah subsidie dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan vital selama 25 tahun.

3. Bidang Pembangunan

- 3.1. Tiap-tiap Propinsi memerlukan plan "5 tahun" tersendiri. Segera mengadakan langsung usaha-usaha pembangunan dan perbaikan di segala lapangan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan jang ada.
- 3.2. Pembagian Devizen dan Kredit D.N & L.N serta pembagian pampasan Djepang harus seimbang dengan luas Daerah [bukan djumlah penduduk] dan djumlah Propinsi Otonomi.
- 3.3. Indonesia Bagian Timur harus didjadikan daerah Barter 70-30 untuk memungkinkan pembangunan.

- 3.4. Penerimaan-penerimaan siswa di tempat-tempat pendidikan penting dalam negeri dan pengiriman-pengiriman siswa ke luar Negeri harus diberi quotum jang vast untuk Indonesia Bagian Timur.
- 3.5. Mengerahkan tenaga Pradjurit, Pemuda/Peladjar dll. tenaga pokok untuk bergotong-rojong dalam membangun projek-projek jang vitaal.
- 3.6. Membentuk suatu corps veteran dan invalide di Indonesia Bagian Timur jang semi officieel dan mendjamin penghidupan jang lajak bagi veteran-veteran jang invalide.
- 3.7. Menuntut, agar Peraturan Pemerintahan No. 41/1954 berlaku djuga untuk djanda-djanda dan jatim piatu anggota badan perdjongan Kemerdekaan sebelum tahun 1950, termasuk korban 40.00 di Sulawesi Selatan.
- 3.8. Menuntut, agar pemeliharaan Makam Pahlawan dan tempat-tempat beribadah atas tanggungan Pemerintah.

4. Bidang Keamanan

Dengan berpedoman kepada Program Ko. Terr. VII, maka mutlak diperlukan dari Pemerintah Pusat sebagai landasan.

- 4.1. Mandat penuh dari Panglima Tertinggi cq. pemerintah untuk menjelesaikan keamanan, sesuai dengan politik keamanan Pemerintah.
- 4.2. Modal keuangan dan aanvulling materiaal jang "VAST" untuk djangka waktu tiga tahun.

5. Bidang Personalialia

- 5.1. Menginginkan pengisian djabat-an-djabat-an penting oleh tenaga-tenaga jang mampu, djudjur, kreatif dan revolusioner consequent dan mentjintai daerah.

B. Tingkat Pemerintah Pusat [Nasional]

1. Supaja dihilangkan/dihapuskan dengan segera

systeem centralisme, jang statis-formil dan merupakan biang keladi birokrasi, korupsi dan stagnasi pembangunan daerah.

2. Mengembalikan dinamik, inisiatif dan kewibawaan-kewibawaan, melalui dencentralisasi, hak dan kekuasaan dengan djalan sebagai berikut :
 - 2.1. Otonomi luas kepada daerah
 - 2.2. 70% dari anggauta Dewan Nasional jang dimaksud oleh Konsepsi Bung Karno, harus dari Wakil-wakil Daerah Otonom tingkat I, untuk achirnja mendapat status Madjelis Tinggi [Senaat] disamping DPR [Parlemen].
 - 2.3. Kabinet Gotong-rojong, harus bersifat Presidentil, terdiri dari tokoh Nasional jang bersih capabel dan disegani, serta diberi mandat penuh oleh Parlemen untuk bekerdja paling kurang lima tahun.
 - 2.4. Baik Dewan Nasional, maupun Kabinet, harus dipimpin oleh Dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai lambang keutuhan, dinamik, dan kewibawaan.
3. Pimpinan Angkatan Perang pada umumnja, dan Angkatan Darat pada khususnja, harus segera dirobah, dirombak dan diganti dengan tenaga-tenaga muda jang dinamis sesuai dengan Piagam Djogja.

III. TJARA-TJARA PERDJOANGAN

-
1. Pertama-tama dengan mejakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masjarakat, bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia, dan semata-mata diperdjoangkan untuk perbaikan nasib rakjat Indonesia dan penjelesaian bengkalai revolusi Nasional.

2. Panglima Terr. VII Wirabuana bersama dengan Konsentrasi Tenaga yang terdiri dari tokoh-tokoh Politik, Pemerintahan, Polisi, Angkatan Perang, Pemuda/Peladjar, Buruh, Tani, Adat, Agama, Wanita dan sebagainya, mengrealiseer de fakto bidang militer, Pemerintahan, Keamanan, Perhubungan, monitair dan ekonomi/sosial diseluruh wilayah Terr. VII Indonesia Bagian Timur, melalui keadaan perang dan Darurat Perang serta Pemerintahan Militer, sesuai dengan pasal 29 UUD Sementara dan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1948 Republik Indonesia Djogja.
3. Mempersiapkan Kongres "Bhineka Tunggal Ika" di Makassar dan Ibu kota-ibu kota Propinsi, yang akan terdiri dari tokoh-tokoh perdjongan 1945, tokoh-tokoh politik anggauta-anggauta Parlemen/Konstituante yang mewakili Indonesia Bagian Timur, tokoh-tokoh pemuda/peladjar, buruh, tani, adat, agama, wanita dan lain sebagainya.
4. Mempersiapkan perundingan dengan Pemerintah Pusat, yang mendapat mandaat penuh dari panglima Tertinggi/Presiden guna mentjapai realisasi maximum dari yang terkandung dalam Piagam ini.
5. Mulai pelaksanaan tugas-tugas pokok dalam segala lapangan yang sudah lama ditunggu dan diharapkan oleh masjarakat yang sesuai dengan alat dan kemampuan, serta penghalang tiap-tiap usaha yang akan melemahkan perdjongan.

IV. PENUTUP

1. Setelah membahas tudjuan-tudjuan pokok dan tjara-tjara pelaksanaan yang akan ditempuh, maka dengan penuh kejakinan, bahwa keputusan-keputusan sutji yang didukung oleh seluruh lapisan masjarakat Indonesia Bagian Timur akan mendapat perhatian sepenuhnya dari Pemerintah Pusat dan Rakjat Indonesia agar realisasi tjita-tjita Revolusi '45 yang telah dan sedang diperdjongkan dapat dirasakan oleh masjarakat Daerah di Indonesia Bagian Timur pada chususnja dan Bangsa Indonesia pada umumnja.

2. Perdjoangan kita ini, adalah landjutan dari Perdjoangan'45, sehingga azas jang kita pegang tetap Proklamasi 17 Agustus 1945, dan pedoman adalah :

"Bhineka Tunggal Ika"

"Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928"

"Hukum2 jang berlaku dalam Negara Republik Indonesia dan bila perlu Hukum Revolusioner"

Makassar , 2 M a r e t 1957.-

Diikrarkan setjara sutji dan dengan iman jang teguh oleh ..

1. H.N.V. Sumual
2. A. Pangerang
3. H.A. Sulthan
4. Abas Dg. Mallewa
5. Ny. M. Towoliue
6. Rafiuddin
7. E. Tadjuddin
8. Andi Mannapiang
9. Sun Bone
10. Sampara Dg. Lili
11. L.J. Rogahang
12. S.H.N. Ngantung
13. Abdul Muluk Makatita
14. Dr.P.Siregar
15. J.H. Tamboto
16. M.Reza
17. J.M. Hutagalung
18. J.E. Tatengkeng
19. M.Nur A.E.
20. A.R. Aris
21. H.M. Junus
22. Nurdin Djohan
23. J. Latumahina
24. B.Korompis
25. Andi Burhanuddin
26. Mustafa Tari
27. G.Kairupan
28. Haneng

29. K. Makkawaru
30. Dr. Towolioe
31. A.S. Dg. Masalle
32. Henk Rondonuwu
33. O.E. Engelen
34. E.Gagola
35. A. Mattalata
36. H.Sholeh
37. Rauf Moo
38. A. Hadjoe
39. W.G.J. Kaligis
40. Lendy R. Tumbelaka
41. M.S. Lahade
42. M.Jusuf
43. J. Ottay
44. Hasan usman
45. Safiudin
46. Bing Latumahina
47. M.Lewarisa
48. Sjamsuddin
49. H.A. Massiara
50. A.W. Rachim
51. Alimuddin Dg. Mattiro

PIAGAM PERJUANGAN SEMESTA
DALAM WILAYAH TERITORIUM VII

I. Pembukaan

1. Kita sebagai Patriot Indonesia menyadari sedalam-dalamnya bahwa keadaan Tanah Air Indonesia setelah melalui masa Perjuangan/Revolusi selama 12 tahun, pada dewasa ini sangat kritis dan mengkhawatirkan.
2. Untuk mencegah keruntuhan dan kehancuran, disebabkan pertentangan dan perpecahan antara kita dengan kita, maka dipandang mutlak untuk segera mengambil tindakan yang cepat dan jitu dengan penuh tanggung jawab sebagai abdi Nusa dan Bangsa Indonesia.
3. Dalam hal tersebut di atas, maka perlu diambil kebijaksanaan untuk menerima segala bengkalai revolusi Nasional Indonesia yang ternyata masih penuh dalam segala lapangan dan tindakan, serta mempergunakan tenaga-tenaga revolusioner sebagai modal untuk penyelesaian.
4. Demi kesejahteraan dan keselamatan Rakyat Indonesia pada umumnya dan Rakyat Daerah pada khususnya, demi tujuan Proklamasi 17 Agustus 1945, serta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, maka kami yang berkumpul pada 2 Maret 1957 dari jam 01.00 sampai 06.00 bertempat di Gubernuran Makassar, setelah menimbang dan membahas segala sesuatu sedalam-dalamnya seia sekata yang diiringi oleh sumpah dan janji yang murni, untuk mengambil langkah-langkah yang tegas guna melaksanakan rencana perjuangan yang tersusun rapih, agar diatasiilah kesulitan dan keruwetan yang menimpa bumi tumpah darah Indonesia pada dewasa ini.

II. Tujuan Perjuangan

A. Tingkat Daerah

1. Bidang Pertahanan:

- 1.1. Wilayah Indonesia Bagian Timur sebagai lingkungan pertahanan wilayah militer tidak dapat dipisah-pisahkan dan memerlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang yang serius [Vide Program Territorium VII].
- 1.2. Dalam perjuangan membebaskan Irian Barat, wilayah Indonesia Timur mutlak merupakan basis militer dan politik psikologis.

2. Bidang pemerintahan:

- 2.1. Untuk kepentingan pembelaan dan praktisnya pembangunan, maka kepada empat provinsi yang ada dalam wilayah Indonesia Bagian Timur harus segera diberikan otonomi seluas-luasnya.

2.2. Otonomi luas berarti buat:

= Daerah surplus: 70% dari pendapatan daerah untuk daerah dan 30% untuk pemerintah pusat.

= Daerah minus: 100% pendapatan daerah untuk daerah ditambah subsidi dari pemerintahan pusat untuk pembangunan vital selama 25 tahun.

3. Bidang Pembangunan:

- 3.1. Tiap-tiap provinsi memerlukan plan "5 tahun" tersendiri. Segera mengadakan langsung usaha-usaha pembangunan dan kesempatan yang ada.
- 3.2. Pembagian devisa dan kredit dalam negeri dan luar negeri serta pembagian pampasan Jepang harus seimbang dengan luas daerah [bukan jumlah penduduk] dan jumlah provinsi otonom.
- 3.3. Indonesia Bagian Timur harus dijadikan daerah barter 70-30 untuk memungkinkan pembangunan.

- 3.4. Penerimaan-penerimaan siswa di tempat-tempat pendidikan penting dalam negeri dan pengiriman siswa ke luar negeri harus diberi kuota yang pasti untuk Indonesia Bagian Timur.
- 3.5. Mengerahkan tenaga prajurit, pemuda pelajar, dan lain-lain tenaga pokok untuk bergotong-royong dalam membangun proyek-proyek yang vital.
- 3.6. Membentuk suatu Korps Veteran dan Invalide [cacat] di Indonesia Bagian Timur yang semi-resmi [officieel] dan menjamin penghidupan layak bagi veteran-veteran invalide [cacat].
- 3.7. Menuntut agar Peraturan Pemerintah No.41/1954 berlaku juga untuk janda-janda dan yatim piatu anggota Badan Perjuangan Kemerdekaan sebelum tahun 1950, termasuk korban 40.000 di Sulawesi Selatan.
- 3.8. Menuntut agar pemeliharaan Makam Pahlawan dan tempat-tempat beribadah atas tanggungan Pemerintah.

4. Bidang Keamanan:

Dengan berpedoman kepada Program Komando Teritorium VII. Maka mutlak diperlukan dari Pemerintah Pusat sebagai landasan:

1. Mandat penuh dari Panglima Tertinggi c.q. Pemerintah untuk menyelesaikan keamanan, sesuai dengan keamanan pemerintah.
2. Modal keuangan dan aanvulling material yang pasti untuk jangka waktu 3 tahun.

5. Bidang Personalia

- 5.1. Menginginkan pengisian jabatan-jabatan penting oleh tenaga yang mampu, jujur, kreatif dan revolusioner konsekuen, dan mencintai Daerah.

B. Tingkat Pemerintah Pusat [Nasional]

1. Supaya dihilangkan/ dihapuskan dengan segera sistem

sentralisme yang statis formil dan merupakan biang keladi birokrasi, korupsi, dan stagnasi pembangunan Daerah.

2. Mengembalikan dinamika, inisiatif dan kewibawaan, melalui desentralisasi hak dan kekuasaan, dengan jalan sebagai berikut:
 - 2.1. Otonomi luas kepada daerah.
 - 2.2. 70% dari anggota Dewan Nasional yang dimaksud oleh konsepsi Bung Karno, harus dari wakil-wakil Daerah otonomi Tingkat I, Untuk akhirnya mendapat status Majelis Tingkat [senat] di samping DPR [parlemen].
 - 2.3. Kabinet Gotong Royong harus bersifat Presidentil terdiri atas tokoh-tokoh nasional yang bersih, kapatibel, dan disegani, serta diberi mandat penuh oleh Parlemen untuk bekerja paling kurang 5 [lima] tahun.
 - 2.4. Baik Dewan Nasional maupun Kabinet harus dipimpin oleh Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta sebagai lambang keutuhan, dinamik, dan kewibawaan.
3. Pemimpin Angkatan Perang pada umumnya, dan Angkatan Darat pada khususnya harus segera diroboh, dirombak dan diganti dengan tenaga-tenaga muda yang dinamis sesuai dengan Piagam Yogya.

III. Cara-cara Perjuangan

1. Pertama-tama dengan meyakinkan seluruh pemimpin dari lapisan masyarakat, bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia, dan semata-mata diperjuangkan untuk perbaikan nasib rakyat Indonesia dan penyelesaian bengkalai revolusi Indonesia.
2. Panglima Territorium VII Wirabuana bersama dengan Konsentrasi Tenaga yang terdiri atas tokoh-tokoh politik, pemerintah, politisi, Angkatan Perang, Pemuda/Pelajar, Buruh, Tani, Adat, Agama, Wanita dan sebagainya, merealisasikan de facto bidang militer, Pemerintahan, Keamanan, Perhubungan, Moneter dan Ekonomi/ Sosial, di seluruh wilayah Terr VII Indonesia Timur, sesuai dengan pasal 29 UUD Sementara dan Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1948 Republik Indonesia Yogya.

3. Mempersiapkan Kongres Bhinneka Tunggal Ika di Makassar dan di ibu kota propinsi yang akan terdiri atas tokoh-tokoh politik, anggota-anggota Parlemen/ Konstituante yang mewakili Indonesia Bagian Timur, tokoh-tokoh pemuda/pelajar, buruh, tani, adat, agama, wanita dan lain sebagainya.
4. Mempersiapkan perundingan dengan pemerintah Pusat, yang mendapat mandat penuh dari Panglima Tertinggi/ Presiden guna mendapat realisasi maksimum dari yang terkandung dalam piagam ini.
5. Mulai pelaksanaan tugas-tugas pokok dalam segala lapangan yang sudah lama ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat yang sesuai dengan alat dan kemampuan yang ada, serta menghalau tiap-tiap usaha yang akan melemahkan perjuangan.

IV. Penutup

1. Setelah membahas tujuan-tujuan pokok dan cara-cara pelaksanaan yang akan ditempuh, maka dengan penuh keyakinan, bahwa keputusan-keputusan suci yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia Bagian Timur, akan mendapat perhatian sepenuhnya dari Pemerintah Pusat dan Rakyat Indonesia, agar terealisasi cita-cita revolusi tahun 1945 yang telah dan sedang diperjuangkan dapat dirasakan oleh masyarakat daerah di Indonesia Timur khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
2. Perjuangan kita ini adalah lanjutan dari perjuangan 45, hingga azas yang kita pegang tetap Proklamasi 17 Agustus 1945, dan pedoman adalah:
 - Bhineka Tunggal Ika,
 - Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928,
 - Hukum-hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia,
 - dan bila perlu: hukum revolusioner.

Makassar, 2 Maret 1957

Dikeluarkan secara suci dan
dengan iman yang teguh oleh:

1. Letkol. Herman Nicolas Ventje Sumual - Panglima Ko.TT-VII
2. Andi Pangerang Petta [Dg.] Rani - Gubernur Sulawesi
3. H. Andi Sulthan Daeng Raja - Residen
4. Abas Dg. Mallewa
5. Ny.Mathilda Towolioe-Hermanses - Bendahara Konsentr.Tenaga
6. Rafiuddin
7. E. Tadjuddin
8. Andi Mannapiang
9. Sun Bone
10. Sampara Daeng Lili
11. L.J. Rogahang
12. S.H.N. Ngantung
13. Abdul Muluk Makatita - Komisaris Konsentrasi Tenaga
14. Dr. P.Siregar
15. Kapten J.H. Tamboto
16. M. Reza
17. J.M. Hutagalung
18. Jan Engelbert Tatengkeng - Sastrawan
19. M. Nur A.E.
20. A.R. Aris
21. H.M. Junus
22. Nurdin Djohan - Presidium Dewan Pemuda Sulawesi
23. J. Latumahina - Ketua Gerakan Pembebasan Irian barat
24. B.Korompis
25. Andi Burhanuddin-Residen Makassar/Ketua Konsentrasi Tenaga
26. Mustafa Tari - Presidium Dewan Pemuda Sulawesi
27. G. Kairupan - pejabat Kantor Penerangan di Makassar
28. Haneng
29. K. Makkawaru
30. Dr.Towolioe - ex.PKRS 1946/anggota Konsentrasi Tenaga
31. A.S. Daeng Masalle - ex.PKRS 1946
32. Henk Rondonuwu-Ketua partai PKR/pendiri Skh.Pedoman Rakyat
33. Letkol.dr.Oscar Eduard Engelen - Ketua IPRI TT-VII
34. Mayor Eddy Gagola
35. Letkol Andi Mattalata - Kastaf KDPSST
36. H.Sholeh
37. Kapten Rauf Mo'o - Kastaf KMKB [Kodam Kota Besar] Makassar
38. A. Hadjoe
39. Kapten W.G.J. Kaligis
40. Kapten Lendy R. Tumbelaka
41. Letkol. Muhammad Saleh Lahade - Kastaf TT-VII/Wirabuana

42. Mayor Andi Muhammad Jusuf - Kastaf Resimen Hassanudin
43. Kapten John Ottay - Kastaf KMKB Manado
44. Hasan usman
45. Safiudin
46. Kapten Bing Latumahina - Sekretaris IPRI Cabaang InTim
47. M.Lewarisa
48. Sjamsuddin
49. H.A. Massiara
50. A.W. Rachim
51. Alimuddin Daeng Mattiro